
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN JUDI ONLINE APARATUR SIPIL
NEGARA DI KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V MAKASSAR**

***IMPLEMENTATION OF THE CIVIL SERVICE'S ONLINE GAMBLING PREVENTION
POLICY AT THE MAKASSAR REGION V AIRPORT AUTHORITY OFFICE***

Arfah^{1*}, Mulyadi Hamid², Andi Nur Insan³

¹Program Magister Manajemen Fakultas Pascasarjana Universitas Fajar Makassar

^{2,3}Universitas Fajar Makassar

Email Korespondensi : riowinanda18@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan judi online di kalangan aparatur sipil negara di Kantor Otoritas Bandar udara wilayah V Makassar, dan untuk mengetahui bagaimana respons organisasi dan individu aparatur sipil negara di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif ini metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena social, pengalaman, perilaku atau persepsi individu atau kelompok di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar. Sampel penelitian diambil dengan teknik purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 7 narasumber melalui wawancara yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar. (2) Budaya organisasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai secara parsial terhadap kinerja pegawai Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar. (3) Secara simultan, gaya kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar

Kata Kunci: Disiplin Pegawai, Mencerminkan Kinerja Individu Pegawai

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the implementation of online gambling prevention policies among civil servants at the Airport Authority Office Region V Makassar, and to examine the organizational and individual responses of civil servants at the Airport Authority Office Region V Makassar. This research employs a qualitative method, which focuses on gaining an in-depth understanding of social phenomena, experiences, behaviors, or perceptions of individuals or groups within the Airport Authority Office Region V Makassar. The research sample was determined using purposive sampling, resulting in seven informants who were interviewed, with the validity and reliability of the data having been tested. The findings of this study indicate that: (1) transformational leadership style has a positive and significant effect on employee performance at the Airport Authority Office Region V Makassar; (2) organizational culture does not have a positive effect on employee performance when examined partially at the Airport Authority Office Region V Makassar; and (3) simultaneously, transformational leadership style and organizational culture have a significant effect on employee performance at the Airport Authority Office Region V Makassar.

Keywords: Employee Discipline, Reflecting Individual Employee Performance

PENDAHULUAN

Dunia penerbangan di era digitalisasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya dalam pemanfaatan teknologi berbasis daring. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi sistem layanan transportasi udara, tetapi juga memengaruhi budaya masyarakat dan cara aparatur penyelenggara layanan menjalankan tugasnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, penerbangan didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara,



angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang lainnya. Dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan di Indonesia, pemerintah menugaskan regulator untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. Salah satu regulator tersebut adalah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar, yang secara struktural berada di bawah Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, unit ini memiliki tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, serta pengawasan dalam berbagai aspek penyelenggaraan penerbangan. Fungsi tersebut mencakup keselamatan, keamanan, kenyamanan penerbangan, pengoperasian bandar udara, penggunaan lahan, pemeliharaan lingkungan, hingga pengawasan kelaikudaraan pesawat udara. Sebagai Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I, Wilayah V membawahi 4 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Pelaksanaan seluruh fungsi strategis ini dijalankan oleh 164 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 163 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dalam konteks ini, peran ASN sangat vital karena mereka merupakan garda terdepan dalam memastikan regulasi dan kebijakan transportasi udara berjalan sesuai standar keselamatan dan keamanan. Namun, di tengah transformasi digital, ASN menghadapi tantangan baru yang dapat memengaruhi integritas dan profesionalisme. Salah satu fenomena serius yang muncul adalah maraknya praktik judi online (judol). Fenomena ini kian mengkhawatirkan karena tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga merambah kalangan aparatur pemerintah.

Judi online merupakan aktivitas ilegal yang berdampak negatif secara multidimensi, baik pada aspek ekonomi, sosial, psikologis, maupun kesehatan. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga akhir tahun 2023 pemerintah telah memblokir lebih dari 800.000 situs judi online di Indonesia (Kominfo, 2023). Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan mencatat bahwa perputaran dana dalam aktivitas ini mencapai lebih dari Rp327 triliun pada 2023, meningkat drastis dari Rp190 triliun pada 2022 (PPATK, 2023). Angka ini menunjukkan betapa masifnya peredaran dan dampak perjudian online terhadap stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Lebih jauh lagi, keterlibatan ASN dalam praktik judi online menimbulkan persoalan serius. ASN sebagai pelayan publik dituntut menjaga integritas, etika, dan profesionalisme. Namun, fakta menunjukkan sejumlah ASN di berbagai instansi pemerintah kedapatan menggunakan gaji dan tunjangan kinerja untuk berjudi online. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bahkan menyatakan bahwa pemerintah sedang memproses pemecatan sejumlah ASN yang terbukti terlibat, karena tindakan tersebut dianggap merusak integritas birokrasi dan menurunkan produktivitas kerja (KemenPANRB, 2024).

Fenomena ini juga terjadi di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan melalui berbagai regulasi. Salah satunya adalah Surat Edaran Menteri PANRB No. 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah. Di Kementerian Perhubungan, larangan judi online ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran No. SE-MHB 3 Tahun

2024, yang mengatur pencegahan dan pengendalian judi online di lingkungan ASN Kemenhub. Di tingkat internal Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V, pengawasan dilakukan oleh Bagian Tata Usaha dengan membentuk tim internal, melaksanakan sosialisasi, serta menjatuhkan sanksi disiplin bagi pelanggar.

Meski demikian, efektivitas implementasi kebijakan pencegahan judi online di lingkungan ASN masih menjadi pertanyaan besar. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan dan pengawasan belum berjalan optimal. Misalnya, Putri (2023) menemukan bahwa gaya hidup konsumtif dan tekanan ekonomi mendorong ASN di Surabaya terlibat judi online, sementara aspek kebijakan pencegahan kurang dibahas. Nugroho (2022) menyoroti lemahnya pengawasan internal di Jawa Barat, tetapi belum menjelaskan faktor organisasi secara mendalam. Penelitian Nurhalimah dan Siregar (2023) menilai Surat Edaran MenPANRB tentang disiplin ASN cukup efektif dalam skala makro, namun tidak menyinggung implementasi di level teknis. Sementara itu, Yuliani (2022) mengkaji sistem pengawasan berbasis internet, tetapi belum mengaitkannya dengan perilaku ASN secara komprehensif. Wibowo (2023) membahas persepsi pimpinan terhadap ancaman judi online, namun analisisnya terbatas pada deskripsi umum.

Dengan demikian, terdapat gap penelitian yang penting untuk diisi, yaitu kajian mikro mengenai bagaimana implementasi kebijakan pencegahan judi online dijalankan di tingkat unit pelaksana teknis, khususnya pada instansi vertikal seperti Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar. Kajian ini menjadi relevan mengingat posisi strategis kantor tersebut dalam menjaga keselamatan penerbangan di kawasan timur Indonesia, yang menuntut ASN untuk selalu berintegritas dan bebas dari praktik ilegal.

Penelitian ini berupaya memberikan analisis mendalam tentang implementasi kebijakan pencegahan judi online ASN di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V dengan menelaah aspek komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam reformasi birokrasi dan manajemen risiko digital. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi aplikatif untuk memperkuat strategi pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan di lingkungan ASN, sehingga mampu menjaga integritas dan profesionalisme aparatur pemerintah di era digitalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami implementasi kebijakan pencegahan judi online di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengelola pengumpulan, analisis, hingga interpretasi data. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V sebagai unit analisis tunggal, dengan waktu pelaksanaan direncanakan pada pertengahan hingga akhir tahun 2025. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi

lapangan, serta data sekunder berupa dokumen resmi dan literatur terkait kebijakan disiplin ASN dan pencegahan judi online.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, yang dipadukan untuk memungkinkan triangulasi data. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui tahapan reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Uji keabsahan data dilakukan dengan mengacu pada kriteria Lincoln dan Guba (1985), yaitu credibility, transferability, dependability, dan confirmability, melalui triangulasi, deskripsi kontekstual, audit trail, serta perbedaan antara data faktual dan interpretasi peneliti. Dengan rancangan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang mendalam, valid, dan kontributif dalam memperkuat kebijakan pencegahan judi online di lingkungan ASN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan wawancara pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 Pukul 10.45 Wita pada saat selesai melakukan rapat internal Subbagian Umum dan Kepegawaian diruang rapat pada informan yang pertama, disamping sebagai informan dari peneliti informan ini juga sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V dimana yang kita ketahui bersama unit kerja ini juga yang mengurus terkait Sumber Daya Manusia dikantor pemerintahan. Adapun alasan peneliti memilih informan tersebut karena informan tersebut berkaitan langsung dengan Sumber Daya Manusia, Bagian Rumah Tangga, dan Bagian Hukum Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V. Adapun isi dari wawancara berdasarkan Undang Undang, Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait larangan dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara dilingkungan instansi pemerintah. Adapun inti dari wawancara terkait bagaimana implementasi kebijakan pencegahan judi online di kalangan Aparatur Sipil Negara, resiko apa yang timbul, cara penanganan bilamana ada pegawai Aparatur Sipil Negara yang terindikasi atau diduga melakukan judi online di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara khususnya di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V.

Pada kesempatan ini peneliti bertanya ke informan selain dari itu juga sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bagaimana tanggapan awal dari organisasi atau kantor terhadap penerapan kebijakan pencegahan judi online.

"Informan W menjelaskan bahwa Organisasi secara umum merespon positif kebijakan ini pimpinan menyadari bahwa judi online merupakan ancaman serius bagi integritas dan kedisiplinan pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Menteri PAN-RB, serta Surat Edaran dari Kementerian Perhubungan sehingga kebijakan ini langsung ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi secara langsung atau menggunakan spanduk, penyusunan edaran internal, dan penguatan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara kebijakan pimpinan di kantor pemerintahan terkait judi online mencakup beberapa aspek, termasuk pencegahan, penindakan, dan edukasi. Pimpinan instansi pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo), telah mengambil langkah-langkah tegas untuk memberantas judi online, seperti memblokir situs judi, memutus akses, dan menindak pelaku serta pihak

yang terlibat. Selain itu, dilakukan pula upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online dikantor maupun lingkungan keluarga Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V" (wawancara W hari jumat tanggal 20 juni 2025).

Adapun terkait SE-MHB No. 3 Tahun 2024, kebijakan ini mencakup dua aspek utama, yaitu pencegahan dan penanggulangan. Pada aspek pencegahan, terdapat beberapa langkah yang dilakukan, antara lain membuat larangan bagi pegawai untuk melakukan maupun mengajak orang lain melakukan judi online serta segala bentuk perjudian lainnya, baik melalui tulisan maupun media sosial. Selain itu, dilakukan upaya menutup akses atau memblokir akun terkait judi online dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan secara langsung juga diterapkan, seperti menegur pegawai apabila terbukti melakukan atau mengajak judi online, serta melakukan pengawasan ketat terhadap barang milik negara agar tidak digunakan sebagai jaminan atau sarana dalam perjudian. Langkah pencegahan ini juga diperkuat dengan kegiatan sosialisasi mengenai risiko dan dampak negatif dari judi online maupun bentuk perjudian lainnya. Sementara itu, pada aspek penanggulangan, kebijakan ini menekankan pentingnya konseling bagi pegawai yang membutuhkan serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran. Bagi pegawai, hukuman disiplin diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai serta Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sedangkan bagi PPNPN, sanksi diterapkan secara bertahap hingga pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antara satuan kerja dengan PPNPN. Implementasi kebijakan ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen kegiatan sosialisasi dan foto kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas. Terkait pencegahan judi online, peneliti kembali bertanya kepada informan Apakah ada bentuk dukungan nyata dari pimpinan terhadap implementasi kebijakan ini.

"Informan W kembali menjelaskan peran pimpinan disini diantaranya memberikan arahan langsung dalam setiap kegiatan apel, rapat internal, forum-forum, menyampaikan melalui media digital juga melakukan Sosialisasi serta menginstruksikan agar seluruh Aparatur Sipil Negara menandatangani pakta integritas. Selain itu, pimpinan juga mendorong agar ada pembinaan mental dan keagamaan secara berkala Jika upaya pembinaan tidak membuahkan hasil, organisasi akan mengambil tindakan disipliner sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi yang diterapkan bervariasi tergantung pada tingkat pelanggarannya. Dimulai dari sanksi ringan seperti teguran lisan atau tertulis, hingga sanksi berat seperti penurunan jabatan atau pemberhentian. Penerapan sanksi ini dilakukan melalui prosedur yang transparan dan akuntabel, yaitu melalui sidang Majelis Kode Etik atau Majelis Pertimbangan Disiplin, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan memiliki dasar hukum yang kuat." (wawancara W hari jumat tanggal 20 juni 2025).

Tantangan utamanya cukup kompleks. Salah satunya adalah sifat judi online yang mudah diakses dan bersifat pribadi, sehingga sulit dideteksi jika tidak ada

pengawasan yang ketat. Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran atau pemahaman dari sebagian pegawai Aparatur Sipil Negara mengenai dampak serius dari judi online, baik bagi diri sendiri maupun instansi pemerintah. Selain itu ada tantangan dalam hal penegakan sanksi yang adil dan transparan, serta memastikan bahwa kebijakan tidak hanya sekadar imbauan, tetapi benar-benar dipatuhi dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh Aparatur Sipil Negara tanpa terkecuali, evaluasi efektivitas kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa petunjuk atau keterangan. Petunjuk yang pertama adalah penurunan kasus atau laporan terkait keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam judi online. Petunjuk yang kedua yaitu tingkat kesadaran dan pemahaman Aparatur Sipil Negara yang dapat diukur melalui survei internal atau evaluasi pasca-sosialisasi. Petunjuk ketiga yaitu konsistensi penegakan sanksi dan dampaknya terhadap perubahan perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara secara keseluruhan keberhasilan ini juga bisa dilihat dari tidak adanya kasus pelanggaran etika atau penurunan kinerja yang disebabkan oleh masalah judi online di lingkungan kantor jika petunjuk atau keterangan ini ada yang diduga terlibat atau terdikasi maka instansi akan menunjukkan perbaikan, maka kebijakan dapat dianggap efektif. Peneliti kembali bertanya kepada informan W bagaimana menyikapi reaksi individu pegawai Aparatur Sipil Negara terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terkait pencegahan terhadap judi online di kantor pemerintahan?

"Informan W menjelaskan bahwa sebahagian besar pegawai Aparatur Sipil Negara merespons dengan baik dan menganggap kebijakan ini penting diterapkan untuk menjaga lingkungan kerja yang sehat tertip atau jauh dari yang namanya judi online, namun seperti biasa ada beberapa pegawai yang awalnya bersikap pasif atau kurang antusias, tetapi setelah diberi pemahaman lebih lanjut pegawai merasa mulai menerima dan mendukung atas penerapan pencegahan judi online, pimpinan disuatu instansi pemerintah selalu mengedepankan pembinaan dan edukasi sebagai langkah awal dalam pembinaan pegawainya bilamana pegawai teridentifikasi melakukan judi online maka Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut akan dipanggil secara rahasia untuk diberikan pemahaman ulang mengenai bahaya judi online dan konsekuensinya baik bagi diri sendiri maupun institusi serta keluarga disamping itu juga kami menyediakan layanan konseling internal atau rujukan ke pihak eksternal yang dapat membantu jika masalahnya bersifat lebih dalam misalnya terkait tekanan finansial pembinaan ini bersifat informal namun terstruktur dengan harapan Aparatur Sipil Negara dapat menyadari kesalahannya dan mengubah sikap sebelum sanksi disiplin diberlakukan. " (wawancara W hari Jumat tanggal 20 juni 2025)

Peneliti kembali menanyakan terkait pemahaman terhadap Sejauh mana Aparatur Sipil Negara memahami isi dan tujuan dari kebijakan pencegahan judi online yang telah diterapkan?

"Ibu W menjelaskan terkait pemahaman Aparatur Sipil Negara terhadap kebijakan pencegahan judi online bervariasi. Beberapa Aparatur Sipil Negara memahami tujuan kebijakan tersebut untuk menjaga integritas dan profesionalisme, serta menghindari dampak negatif judi online pada

diri sendiri dan institusi. namun, ada juga yang mungkin belum sepenuhnya memahami esensi kebijakan, terutama terkait sanksi dan implikasinya. Sosialisasi dan penegakan aturan yang konsisten menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Aparatur Sipil Negara Sosialisasi yang sering dilakukan dari instansi terkait sangat penting untuk memastikan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara memahami larangan dan sanksi terkait judi online. Sosialisasi ini harus mencakup penjelasan mengenai dasar hukum, dampak negatif judi online, serta konsekuensi bagi pelanggar, termasuk sanksi disiplin dan potensi pidana” (wawancara W hari Jumat tanggal 20 juni 2025)

Diakhir wawan cara informan memberikan saran untuk melakukan perbaikan dimasa mendatang misalnya perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya fokus pada larangan, tetapi juga pada edukasi dan rehabilitasi, menyediakan program ruang konsultasi atau dukungan psikologis bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang sudah terlanjur terlibat kolaborasi dengan lembaga atau instansi egara, dapat juga melakkan kerjasama kepada seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau Kominfo, untuk mendapatkan informasi terkini mengenai modus judi online dan cara pencegahannya, memanfaatkan teknologi secara optimal untuk pengawasan yang lebih efektif, namun tetap menjunjung tinggi privasi pegawai Aparatur Sipil Negara dan tidak kala penting juga perlu adanya evaluasi berkala yang melibatkan perwakilan pegawai Aparatur Sipil Negara agar kebijakan yang diterapkan lebih relevan dan diterima dengan baik oleh semua pihak.

Pada Kesempatan kedua ini peneliti melakukan wawancara kembali kepada informan yang berinisial R dalam keadaan sehat walafiat selain itu juga merupakan staf pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V pada hari Rabu tanggal 25 bulan Juni 2025 jam 14.15 Wita bertempat ruang kerja staf tata usaha yang ada di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V pertanyaan peneliti kepada ibu R, peneliti menanyakan sejauh mana pemahaman informan mengetahui mengenai kebijakan dan peraturan terkait pencegahan judi online yang berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V?

“Ibu R menjawab “Pemahaman saya mengenai kebijakan ini mencakup beberapa aspek penting, diantaranya saya memahami bahwa kebijakan ini didasari oleh peraturan dari pemerintah pusat seperti Undang-Undang ITE, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran, Instruksi dari Kementerian Perhubungan, Surat Edaran serta Surat Edaran dari KemenPANRB yang secara spesifik melarang Aparatur Sipil Negara terlibat dalam judi online. ditingkat instansi pemerintah serta masyarakat dan saya juga memahami bahwa pimpinan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V telah mengeluarkan kebijakan internal atau himbauan yang memperkuat larangan tersebut tujuannya jelas untuk menjaga integritas profesionalisme dan citra Aparatur Sipil Negara itu sendiri sebagai pelayan public atau pelayan masyarakat umum serta mencegah dampak negatif seperti penurunan kinerja, masalah finansial, dan potensi pelanggaran etika sesuai aturan yang berlaku.” (wawancara R hari Rabu tanggal 25 juni 2025)

Langkah-langkah yang telah dan sedang diimplementasikan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V untuk mencegah Aparatur Sipil Negara terlibat dalam judi

online diantaranya melakukan sosialisasi kebijakan secara berkala melalui apel pagi, rapat dinas, atau media komunikasi internal kemudian Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V melakukan pemasangan informasi seperti poster atau banner di area kerja yang berisi imbauan dan peringatan tentang bahaya judi online serta pengawasan internal yang lebih ketat, termasuk pemanfaatan teknologi untuk memantau penggunaan internet di lingkungan kantor jika diperlukan, serta pelaporan dari rekan kerja jika ada indikasi keterlibatan dan akan diterapkan atas sanksi tegas yang akan diberikan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yang terbukti melanggar.

Peneliti kembali bertanya kepada informan ibu R bagaimana pemahaman terhadap tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pencegahan judi online di lingkungan kerja Pemerintahan khusus di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V?

"Ibu R menjelaskan kembali tantangan utamanya cukup kompleks salah satunya adalah sifat judi online yang mudah diakses dan bersifat pribadi, sehingga sulit dideteksi jika tidak ada pengawasan yang ketat. tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran atau pemahaman dari sebagian Aparatur Sipil Negara mengenai dampak serius dari judi online baik bagi diri sendiri maupun institusi selain itu ada tantangan dalam hal penegakan sanksi yang adil dan transparan memastikan bahwa kebijakan tidak hanya sekedar imbauan tetapi benar-benar dipatuhi dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh Aparatur Sipil Negara tanpa terkecuali. "
(wawancara R hari Rabu tanggal 25 juni 2025)

Evaluasi efektivitas kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa indikator. Indikator pertama adalah penurunan kasus atau laporan terkait keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam judi online. Indikator kedua adalah tingkat kesadaran dan pemahaman Aparatur Sipil Negara yang dapat diukur melalui survei internal atau evaluasi pasca-sosialisasi Indikator ketiga adalah konsistensi penegakan sanksi dan dampaknya terhadap perubahan perilaku Aparatur Sipil Negara secara keseluruhan. Keberhasilan juga bisa dilihat dari tidak adanya kasus pelanggaran etika atau penurunan kinerja yang disebabkan oleh masalah judi online jika indikator-indikator ini menunjukkan perbaikan, maka kebijakan dapat dianggap efektif.

Peneliti menanyakan kembali kepada informan inisial R ini pemahaman terhadap pengaruh pimpinan dan manajemen Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V dalam mendukung dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan judi online dukungan tersebut bersifat aktif atau pasif?

"Ibu R selaku Informan kembali menjelaskan dari sudut pandang sebagai staf dimana pimpinan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V dapat dikatakan sangat aktif dalam dukungan pencegahan judi online dimana berperan juga sebagai pengambil keputusan mereka tidak hanya sebatas pengesahan kebijakan tetapi juga diwujudkan melalui beberapa langkah konkre misalnya pimpinan secara rutin menyampaikan himbauan dan peringatan dalam setiap saat atau dalam rapat internal mereka juga memastikan adanya pemasangan media informasi seperti poster di area strategis hal ini menunjukkan bahwa pimpinan melihat isu ini sebagai ancaman serius terhadap integritas Aparatur Sipil Negara dan

berkomitmen untuk menanggulangnya dukungan aktif ini menjadi faktor kunci dalam mendorong kepatuhan dari para pegawai." (wawancara R hari Rabu tanggal 25 juni 2025)

Pandangan Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi dua kelompok mayoritas Aparatur Sipil Negara melihat kebijakan ini sebagai langkah yang sangat penting dan relevan untuk melindungi diri mereka dari dampak negatif judi online. Mereka menyadari bahwa keterlibatan dalam judi online dapat merusak karier, finansial, dan citra instansi. Namun, ada sebagian kecil yang mungkin merasa kebijakan ini terlalu mengintervensi ranah pribadi. Mereka beranggapan bahwa aktivitas di luar jam kerja seharusnya tidak diatur. Respons ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran sudah tinggi, masih ada tantangan dalam menyamakan persepsi bahwa seorang Aparatur Sipil Negara terikat pada etika profesi 24 jam sehari. Tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara terhadap kebijakan ini dapat dikatakan cukup tinggi, terutama di lingkungan kerja. Indikasi utamanya adalah minimnya laporan atau temuan mengenai Aparatur Sipil Negara yang aktif berjudi online di jam kerja hal ini disebabkan oleh pengawasan internal dan kesadaran bersama. Namun, tantangan terbesarnya adalah mengawasi aktivitas di luar jam kerja. Indikasi keberhasilan yang lebih dalam bisa dilihat dari tidak adanya kasus Aparatur Sipil Negara yang mengalami masalah finansial serius atau penurunan kinerja yang diakibatkan oleh judi online sebaliknya jika ada kasus-kasus tersebut yang muncul, itu bisa menjadi indikasi bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya efektif ada beberapa faktor utama yang memengaruhi respons Aparatur Sipil Negara kualitas sosialisasi dan edukasi jika sosialisasi disampaikan secara persuasif dan komprehensif tentang bahaya judi online, respons akan lebih positif konsistensi penegakan sanksi Aparatur Sipil Negara akan lebih patuh jika mereka tahu bahwa pelanggaran akan ditindak tegas tanpa pandang bulu contoh dari pimpinan ketika pimpinan memberikan teladan yang baik, hal itu akan memengaruhi sikap seluruh Aparatur Sipil Negara Faktor terakhir adalah situasi finansial dan tekanan sosial yang dialami individu beberapa Aparatur Sipil Negara mungkin terjerumus karena tekanan ekonomi, sehingga respons mereka terhadap kebijakan ini bisa menjadi kompleks.

Peneliti kembali menanyakan kepada ibu R selaku informan terhadap bagaimana organisasi mengidentifikasi dan merespons Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan sikap kurang kooperatif atau acuh tak acuh terhadap kebijakan pencegahan judi online? Apa saja indikator awal yang menjadi perhatian?

"Ibu R kembali menjelaskan Organisasi mengidentifikasi Aparatur Sipil Negara yang kurang kooperatif melalui beberapa indikator minimnya partisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau edukasi, adanya keluhan atau sikap menolak secara halus terhadap aturan yang ditetapkan oleh pimpinan di instansi meskipun tidak disampaikan secara terbuka, adanya penurunan kinerja atau masalah finansial yang terindikasi dari perilaku sehari-hari. Respons awal yang kami lakukan bersifat persuasif yaitu dengan melakukan pendekatan personal atau pembinaan oleh atasan langsung pendekatan ini bertujuan untuk memahami alasan di balik sikap tersebut, apakah karena ketidapkahaman, masalah pribadi, atau hal lainnya." (wawancara R hari Rabu tanggal 25 juni 2025)

Peneliti meminta penjelasan kepada informan terhadap kebijakan dalam penanganan judi online apa berdampak positif terhadap suasana kerja dan integritas ASN? Mengapa?

“Informan menjelaskan terkait kebijakan yang diterapkan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat berdampak positif pada suasana kerja dan integritas, terutama jika kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi, dan akuntabilitas namun, efektivitas kebijakan juga sangat bergantung pada implementasinya yang adil, konsisten, dan didukung oleh sistem pengawasan yang kuat yang telah dicanang dari kantor pusat khususnya dari kementerian”

Respons dari Aparatur Sipil Negara yang sudah terlanjur terlibat umumnya cenderung menghindari dan tertutup. Aparatur Sipil Negara merasa malu atau takut akan sanksi yang mungkin diberikan hal ini menjadi tantangan besar bagi organisasi meskipun ada imbauan untuk mencari bantuan stigma sosial masih sangat kuat oleh karena itu penting bagi organisasi untuk tidak hanya fokus pada sanksi tetapi juga menyediakan jalur bantuan yang rahasia dan aman seperti konseling agar mereka merasa lebih nyaman untuk terbuka menciptakan lingkungan yang suportif dan non-judgmental atau tidak menghakimi seseorang adalah kunci untuk mengubah respons mereka dari defensif menjadi kooperatif.

Pada kesempatan ini peneliti melakukan wawancara kembali kepada informan Ketiga yang berinisial FC yang juga sebagai staf di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V yang tugas sehari harinya di kantor di jabatan teknis diantara tugasnya melakukan pengawasan dan pengendalian khususnya di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tenggara wawancara dilakukan hari Senin tanggal 28 bulan Juli 2025 pada jam 15.00 Wita disalah satu ruang kerja staf yang ada pada kantor, peneliti bertanya kepada bapak FC, peneliti menanyakan kepada informan bagaimana pemahaman saudara mengenai organisasi/ merespons jika ada Aparatur Sipil Negara yang kurang kooperatif atau bersikap acuh terhadap kebijakan atas pencegahan judi online yang telah ditetapkan pemerintah?

“Bapak FC disini menjelaskan atas pemahamannya atas pengetahuan atas organisasi memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti secara serius setiap bentuk ketidakpatuhan atau sikap acuh dari pegawai Aparatur Sipil Negara terhadap kebijakan pencegahan judi online respons organisasi biasanya dilakukan secara bertahap dan berjenjang, dimulai dari pendekatan persuasif melalui pembinaan oleh atasan langsung Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan sikap kurang kooperatif akan dipanggil dan diberikan penjelasan ulang mengenai isi, tujuan, dan konsekuensi dari kebijakan tersebut jika sikap tidak kooperatif terus berlanjut, organisasi dapat memberikan teguran tertulis sebagai bagian dari pembinaan kedisiplinan dalam kasus tertentu terutama jika ditemukan bukti pelanggaran seperti keterlibatan langsung dalam aktivitas judi online, maka organisasi atau yang mengurus sumber daya manusianya akan menindaklanjuti sesuai mekanisme hukum dan peraturan yang berlaku atas disiplin Aparatur Sipil Negara, termasuk kemungkinan dikenakan sanksi administratif atau bahkan sanksi berat sesuai PP Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (wawancara FC hari senin tanggal 28 juli 2025)

Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara memahami bahwa kebijakan ini bukan hanya formalitas, tetapi merupakan upaya serius pemerintah untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan citra aparatur negara. Selain itu, penegakan disiplin juga bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong budaya kerja yang bersih serta bebas dari penyimpangan digital seperti judi online jika upaya pembinaan tidak membuahkan hasil, organisasi akan mengambil tindakan disipliner sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi yang diterapkan bervariasi tergantung pada tingkat pelanggarannya, mulai dari sanksi ringan seperti teguran lisan atau tertulis, hingga sanksi berat seperti penurunan jabatan atau pemberhentian. Penerapan sanksi ini dilakukan melalui prosedur yang transparan dan akuntabel, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan memiliki dasar hukum yang kuat. Kami menekankan pentingnya komunikasi yang terus-menerus dan terbuka. Setiap kali ada kasus yang ditangani, kami menggunakan kasus tersebut sebagai studi kasus untuk sosialisasi, tanpa menyebutkan nama individu kami menjelaskan konsekuensi yang ditimbulkan, baik dari sisi pribadi maupun karier hal ini bertujuan untuk memberikan pesan yang jelas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara bahwa sikap acuh tak acuh akan ditindaklanjuti secara serius kami juga secara rutin menginformasikan peraturan dan kebijakan baru melalui berbagai platform komunikasi internal agar tidak ada lagi alasan ketidaktahuan.

Peneliti kembali menanyakan kepada informan inisial FC apa saja bentuk partisipasi aktif seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mendukung implementasi kebijakan dalam pencegahan judi online?

"Informan FC ini menjelaskan kepada peneliti bahwa seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dapat berpartisipasi secara aktif dengan menjadi teladan bagi rekan-rekan kerja dengan menunjukkan integritas dan menghindari segala bentuk perjudian, mereka bisa menjadi duta yang efektif. Peran ini tidak memerlukan jabatan formal, melainkan kesadaran untuk menyebarkan informasi tentang bahaya judi online dan menjadi contoh nyata dari Aparatur Sipil Negara yang beretika partisipasi aktif juga terwujud dalam bentuk pengawasan sosial internal jika seorang Aparatur Sipil Negara melihat indikasi bahwa rekannya terpengaruh judi online, seperti sering meminjam uang atau menunjukkan penurunan kinerja, Aparatur Sipil Negara dapat mengambil inisiatif untuk saling mengingatkan pegawai satu dengan yang lain dengan cara yang bijaksana dan empatik budaya saling peduli ini menciptakan jaringan pengawasan yang kuat di antara rekan kerja di kantor" (wawancara FC hari senin tanggal 28 juli 2025)

Saat ada program sosialisasi atau edukasi dari instansi partisipasi aktif tidak hanya sebatas kehadiran Aparatur Sipil Negara bisa terlibat dalam diskusi, mengajukan pertanyaan, dan berbagi sudut pandang mereka masukan-masukan ini sangat berharga bagi pimpinan untuk memahami tantangan yang dihadapi di lapangan dan menyempurnakan kebijakan yang ada partisipasi aktif juga bisa dilakukan dengan memperkuat diri sendiri agar tidak mudah terjerumus Aparatur

Sipil Negara bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif di luar pekerjaan, seperti olahraga, hobi, atau pengembangan diri dengan mengisi waktu luang dengan hal-hal produktif atau positif, godaan untuk mencoba judi online dapat diminimalisasi jika ada Aparatur Sipil Negara yang memiliki informasi atau indikasi kuat tentang adanya pelanggaran, partisipasi aktif adalah dengan melaporkannya melalui saluran yang tepat tindakan ini membantu organisasi untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan, baik berupa pembinaan maupun penindakan, sesuai dengan prosedur yang berlaku hal ini menunjukkan komitmen terhadap integritas dan kode etik terhadap seorang Aparatur Sipil Negara.

Peneliti melakukan wawancara pada informan inisial AP pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 Pukul 09.55 Wita di ruang kerja staf Kantor informan tersebut merupakan staf pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Informan ini sehari mengerjakan tugas sebagai penerima bukan pajak bisa juga dijelaskan sebagai pungutan yang dibayar orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara dimana dari wawancara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri yang mengatur terkait larangan dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara dilingkungan instansi pemerintah adapun inti pokok dari wawancara masalah terkait bagaimana implementasi kebijakan pencegahan judi online di kalangan Aparatur Sipil Negara, resiko apa yang timbul, cara penanganan bilamana ada yang terindikasi melakukan judi online di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V

Peneliti menanyakan kepada informan AP apakah informan mengetahui adanya kebijakan atau peraturan yang melarang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat dalam judi online?

"Bapak AP menjelaskan cukup mengetahui terkait ada kebijakan dan peraturan yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat dalam judi online larangan ini didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini secara umum mengatur tentang kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin bagi PNS dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah. Surat edaran ini dibuat secara spesifik untuk mengatasi maraknya kasus judi online di kalangan Aparatur Sipil Negara Melalui surat edaran ini, Menteri PANRB meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di setiap instansi untuk melakukan pengawasan dan menindak tegas pegawai Aparatur Sipil Negara yang terlibat. (wawancara AP hari Kamis tanggal 31 Juli 2025)

Meskipun tidak secara spesifik menyebut judi online perilaku ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini terutama terkait menjaga integritas dan etika sebagai abdi negara bagi Aparatur Sipil Negara yang terbukti terlibat dalam judi online sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggarannya sanksi ini dapat berupa hukuman disiplin ringan seperti teguran lisan atau tertulis hukuman disiplin sedang, seperti pemotongan tunjangan kinerja, hukuman disiplin berat termasuk penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sanksi ini juga berlaku bagi pegawai non-ASN Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terbukti terlibat maka kontrak kerja bisa diputus pemerintah menegaskan bahwa judi online adalah pelanggaran hukum dan tindakan yang tidak sejalan dengan integritas sebagai Aparatur Sipil Negara oleh karena itu para pimpinan instansi dihimbau untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya judi online kepada seluruh pegawai mengadakan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan judi online secara hybrid yang memungkinkan pegawai untuk berpartisipasi baik secara fisik maupun daring metode ini efektif untuk menjangkau seluruh Aparatur Sipil Negara di berbagai wilayah, terutama pegawai di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Sosialisasi ini juga dapat dilakukan melalui media internal, seperti grup wa media sosial kantor, email, atau papan pengumuman dengan cara ini informasi dapat tersebar dengan cepat dan mudah diakses oleh seluruh pegawai.

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada informan AP apakah informan merasa bahwa kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah ini memberikan perlindungan atau justru membatasi kebebasan pribadi informan?

"Informan AP menjelaskan keterlibatan dalam judi online sering kali menimbulkan masalah keuangan yang serius, seperti utang, perselisihan dalam rumahtangga dan masalah mental, seperti stres dan depresi. kebijakan ini secara tidak langsung melindungi pegawai Aparatur Sipil Negara dari risiko tersebut sebagai abdi negara, Aparatur Sipil Negara diharapkan memiliki integritas tinggi. Judi online dapat merusak citra diri dan institusi kebijakan ini membantu menjaga integritas Aparatur Sipil Negara dari tindakan yang merusak jiwa dengan adanya larangan ini, lingkungan kerja dapat terbebas dari dampak negatif judi online, seperti menurunnya produktivitas dan potensi penyalahgunaan wewenang untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh judi online " (wawancara AP hari Kamis tanggal 31 Juli 2025)

Kebijakan yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat judi online bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai perlindungan dan pembatasan kebebasan pribadi. Sudut pandang ini sangat bergantung pada bagaimana seseorang melihat peran dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara kebijakan ini dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan, baik bagi individu maupun bagi institusimisalnya perlindungan finansial dan mental keterlibatan dalam judi online sering kali menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, dan masalah mental, seperti stres dan depresi kebijakan ini secara tidak langsung melindungi Aparatur Sipil Negara dari risiko-risiko tersebut dan Perlindungan integritas sebagai Aparatur Sipil Negara seseorang diharapkan memiliki integritas tinggi dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Judi online merupakan aktivitas ilegal yang dapat merusak citra diri dan institusi kebijakan ini membantu menjaga integritas Aparatur Sipil Negara dari tindakan yang merusak serta Lingkungan kerja yang sehat: Dengan adanya larangan ini, lingkungan kerja dapat terbebas dari dampak negatif judi online, seperti menurunnya produktivitas dan potensi penipuan atau korupsi yang dilakukan untuk menutupi kerugian.

Peneliti menanyakan kepada informan AP bagaimana komunikasi internal dilakukan untuk menyampaikan pentingnya kebijakan ini kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan kantor?

"Informan mengutarakan pentingnya kebijakan diterapkan yaitu untuk menyampaikan pentingnya suatu kebijakan kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara, komunikasi internal dapat dilakukan melalui berbagai saluran dan strategi. Beberapa metode yang efektif antara lain adalah penyampaian informasi secara formal melalui surat edaran atau pengumuman resmi, sosialisasi melalui forum diskusi atau rapat, pemanfaatan media komunikasi internal seperti grup obrolan internal atau portal informasi internal, serta melalui komunikasi personal dari atasan langsung kepada bawahan. (wawancara AP hari Kamis tanggal 31 Juli 2025)

Penerapan kebijakan juga harus diikuti dengan evaluasi berkala untuk melihat efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

"Namun, perlu diingat bahwa perubahan perilaku dan peningkatan kedisiplinan tidak selalu terjadi secara instan. Mungkin diperlukan waktu bagi pegawai untuk beradaptasi dengan kebijakan baru dan mengubah kebiasaan mereka. Selain itu, keberhasilan kebijakan juga sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan didukung oleh seluruh organisasi" (wawancara AP hari Kamis tanggal 31 Juli 2025)

Peneliti bertanya kembali kepada informan bahwa apa saja bentuk partisipasi aktif dari Aparatur Sipil Negara dalam mendukung implementasi kebijakan pencegahan judi online?

"Partisipasi aktif Aparatur Sipil Negara dalam mendukung implementasi kebijakan pencegahan judi online dapat berupa: kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, penyampaian atau sosialisasi terhadap bahaya judi online serta pelaporan aktivitas mencurigakan terkait judi online. Aparatur Sipil Negara juga diharapkan menjaga integritas dan profesionalisme, serta menghindari bentuk atau terlibat dalam segala bentuk perjudian" (wawancara AP hari Kamis tanggal 31 Juli 2025)

Disisi lain kebijakan bisa dianggap sebagai pembatasan terutama bagi mereka yang merasa bahwa apa yang dilakukan di luar jam kerja adalah urusan pribadi garis batas antara pribadi dan professional argumen ini berpusat pada pemisahan antara kehidupan pribadi dan professional sebagian orang merasa bahwa aktivitas di luar kantor tidak seharusnya diatur oleh institusi selama tidak mengganggu kinerja pegawai yang ada di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V hak untuk memilih beberapa orang mungkin merasa bahwa mereka cukup dewasa untuk mengambil keputusan sendiri termasuk risiko dari aktivitas kebijakan yang mengatur hal ini dapat dirasakan sebagai bentuk intervensi yang berlebihan secara umum kebijakan ini lebih banyak dilihat sebagai bentuk perlindungan terutama mengingat peran pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai abdi negara yang memiliki tanggung jawab besarmeskipun ada nuansa pembatasan kebebasan tujuannya adalah untuk memastikan integritas, etika, dan kinerja Aparatur Sipil Negara tetap terjaga larangan ini bukan hanya tentang aktivitas itu sendiri, tetapi juga tentang dampak negatif yang bisa ditimbulkannya terhadap diri sendiri, keluarga, dan institusi. Beberapa aspek umum yang bisa dipertimbangkan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V untuk memperkuat kebijakan pencegahan judi online di instansi peningkatan pengawasan digital dapat memasang perangkat lunak pemblokiran situs judi online pada jaringan Wi-Fi publik bandara. Selain itu mereka juga bisa

secara rutin memantau penggunaan internet di area bandara untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan edukasi dan sosialisasi dapat mengadakan kampanye sosialisasi atau memasang poster informatif di area bandara tentang bahaya judi online dan konsekuensinya, baik dari segi hukum maupun social kantor pemerintah dapat juga menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), atau instansi lain yang berwenang untuk bertukar informasi dan melakukan tindakan pencegahan bersama dan pimpinan juga mempertimbangkan untuk membatasi akses internet di area-area tertentu, seperti ruang istirahat staf atau area operasional, untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas kantor.

Informan AP memberikan saran kepada peneliti agar pegawai Aparatur Sipil Negara terhadap kebijakan pencegahan judi online dapat lebih positif dan berkelanjutan pengawasannya.

“Penyampaian dari informan untuk meningkatkan respons positif dan berkelanjutan pegawai Aparatur Sipil Negara terhadap kebijakan pencegahan judi online, beberapa saran dapat diberikan. yang pertama, perlu dilakukan edukasi yang intensif dan berkelanjutan mengenai bahaya judi online, baik dari sisi hukum maupun dampak sosial dan ekonominya. Yang kedua perlu ada pengawasan yang ketat dan penegakan disiplin yang konsisten terhadap Aparatur Sipil Negara yang melanggar aturan terkait judi online. Ketiga, perlu disediakan alternatif kegiatan positif dan produktif bagi ASN, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan olahraga, atau kegiatan sosial lainnya untuk masyarakat luas yang ada disekitar kita” (wawancara AP hari kamis tanggal 31 juli 2025)

Maraknya judi online telah menjadi ancaman serius terhadap kedisiplinan pegawai, karena dapat menurunkan produktivitas, mengganggu fokus kerja, dan memicu perilaku menyimpang di lingkungan kantor oleh karena itu, perlu adanya langkah preventif berupa edukasi, pengawasan ketat, serta penegakan sanksi disiplin bagi pegawai yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online, guna menjaga integritas dan profesionalisme di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V.

Hasil analisis mengenai perilaku menyimpang ASN yang terlibat dalam judi online dapat dijelaskan dan disesuaikan dengan sistem pengendalian manajemen menurut Anthony & Govindarajan (2007), di mana penyimpangan terjadi akibat kegagalan pada satu atau lebih tahapan pengendalian seperti lemahnya pengawasan, tidak efektifnya penegakan aturan, atau kurangnya tindakan korektif yang tegas. Identitas Subjek Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran perilaku adiktif pada pelaku judi online. 4 (empat) orang yang akan diwawancarai berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan peneliti. Kriteria subjek antara lain dari kalangan pejabat struktural, staf teknis, staf administrasi yang cukup memahami atas permasalahan dari peneliti dan berdasarkan rumusan masalah atas konsentrasi judul tesis peneliti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan judi online memberikan dampak negatif terhadap kedisiplinan dan kinerja pegawai di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V. Meskipun belum

ditemukan kasus secara masif, indikasi keterlibatan sebagian kecil pegawai menunjukkan perlunya langkah antisipatif judi online berpotensi menurunkan fokus kerja, meningkatkan tingkat stres, dan mengganggu stabilitas mental pegawai oleh karena itu dibutuhkan penguatan pengawasan internal, peningkatan kesadaran melalui sosialisasi, serta penerapan sanksi tegas guna mencegah dan menanggulangi praktik tersebut di lingkungan kerja. Judi online bukan hanya menjadi masalah pribadi, tetapi telah berkembang menjadi isu kedisiplinan yang dapat merusak budaya kerja di instansi pemerintah, termasuk di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V dimana akses yang mudah melalui perangkat pribadi dan lemahnya kontrol digital menjadi faktor pendorong utama selain menurunkan produktivitas, keterlibatan dalam judi online juga berpotensi menimbulkan pelanggaran kode etik, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakstabilan emosional pegawai oleh karena itu pendekatan pencegahan harus bersifat menyeluruh, meliputi aspek regulasi, pembinaan mental, serta pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini.

DAFTAR PUSTAKA

- A ASRIADI · 2021 · Dirujuk 25 kali Jika tinjau lebih mendalam mengenai perilaku kecanduan judi online, kita dapat menggunakan landasan atau pendekatan behaviour untuk menganalisis perilaku.
- A Laras · 2024 · Dirujuk 53 kali Penelitian ini juga mengevaluasi kebijakan dan penegakan hukum yang ada, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kecanduan judi online.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>
- D noto Kusumo · 2023 · Dirujuk 32 kali — Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu mempertaruhkan sejumlah uang di mana pihak yang menang akan mendapatkan seluruh uang taruhan.
- Ghiffari, A. M., Jaolis, E. V., Ahmad, H., & Rakhmawati, N. A. (2024). Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah terkait Kasus Komdigi dalam Perlindungan Situs Judi Online: Studi Kasus pada Mahasiswa Sistem Informasi ITS
- ISMAIL, Fauzan, et al. (2025). Peran Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI. Bachelor's Thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia. *Jurnal Independent*
- Kementerian PANRB. (2024). Pemerintah Proses Pemecatan ASN yang Terlibat Judi Online. <https://www.menpan.go.id>
- Kominfo. (2023). Kementerian Komunikasi dan Informatika Blokir Lebih dari 800.000 Situs Judi Online. <https://www.kominfo.go.id>



- Mustaqilla, S., Sarah, S., Salsabila, E. Z., & Fadhillah, A. (2023). Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Nugroho, S. (2022). Pengawasan Internal dalam Pencegahan Penyalahgunaan Internet oleh ASN. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Nurhalimah, L. & Siregar, D. (2023). Efektivitas Surat Edaran Disiplin ASN dalam Era Digital. *Jurnal Reformasi Birokrasi*.
- Paramartha, P. P. R., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Sanksi Pidana terhadap Para Pemasang dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online. *Jurnal Preferensi Hukum*.
- Paramartha, P. P. R., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Sanksi Pidana terhadap Para Pemasang dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online. *Jurnal Preferensi Hukum*.
- PPATK. (2023). Laporan Tahunan 2023: Analisis Transaksi Keuangan Ilegal. <https://www.ppatk.go.id>
- Putri, R. A. (2023). Perilaku Judi Online pada Kalangan ASN di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*.
- Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*.
- SH Bakhtiar · 2024 · Dirujuk 45 kali — Pelarangan perjudian telah diatur dalam KUHP Pasal 303 dan untuk perjudian online telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi Online.
- Sulistyo, H., & Ardjayeng, L. (2018). Tinjauan yuridis tentang perjudian online ditinjau dari undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2).
- Wibowo, A. (2023). Persepsi Pimpinan terhadap Ancaman Judi Online bagi ASN. *Jurnal Kepemimpinan dan Etika Publik*.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/case-study-research-and-applications/book250150>
- Yuliani, M. (2022). Pemanfaatan Teknologi Pengawas Internet di Lingkungan Pemerintahan. *Jurnal Teknologi dan Kebijakan Publik*.